

RENCANA KERJA BPBD KAB. MAGELANG 2022



**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN
MAGELANG**

Jl. Soekarno-Hatta No. 7. A Telp. (0293) 789182 Fax. (0293)
788080 Kota Mungkid 56511



SALINAN

BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 34 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024, Pemerintah Daerah menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

- b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 merupakan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Magelang Tahun 2021 yang akan dijadikan dasar penyusunan kegiatan pembangunan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 496);

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 28);

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2009 Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 81);

Peraturan Bupati Magelang Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 26) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 33 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 Nomor 33);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2022.

Pasal 1

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Magelang untuk periode 1 (satu) tahun anggaran dimulai pada Tanggal 1 Januari 2022 dan berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022.

Pasal 2

RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi pedoman dalam:
penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022;
penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2022; dan
pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Pasal 3

RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I PENDAHULUAN
- b. BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
- c. BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH
- d. BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
- e. BAB V KEBIJAKAN PENGEMBANGAN WILAYAH KABUPATEN MAGELANG
- f. BAB VI RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
- g. BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
- h. BAB VIII PENUTUP

Pasal 4

Dokumen RKPD sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 28 Oktober 2021
BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 28 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

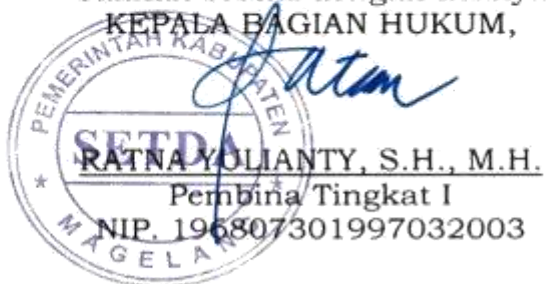
ttd

ADI WARYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2021 NOMOR 34

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



RATNA YULIANTY, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 196807301997032003

DAFTAR ISI

Peraturan Bupati Magelang Nomor 34 tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022	i
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	5
1.4. Sistematika Penulisan.....	6
BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU	7
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD.....	7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD.....	23
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD.....	25
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	27
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	38
BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ...	39
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	39
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD.....	41
3.3. Program dan Kegiatan.....	41
BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	47
BAB V : PENUTUP.....	55

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 adalah suatu langkah untuk menyusun rencana jangka pendek atau satu tahunan yang bersifat menyeluruh, memberikan rumusan kemana organisasi akan diarahkan, dan bagaimana pemberdayaan sumber daya yang dialokasikan untuk mencapai tujuan, selama jangka waktu satu tahun. Renja PD Tahun 2022 juga merupakan suatu proses pemilihan tujuan-tujuan organisasi, penentuan strategi, kebijakan, program-program strategi yang diperlukan untuk tujuan-tujuan tersebut. Dengan adanya Renja PD Tahun 2022 ini maka konsep organisasi menjadi jelas sehingga akan memudahkan dalam memformulasikan sasaran serta rencana-rencana lain dan dapat mengarahkan sumber daya-sumber daya organisasi secara efektif.

Renja PD Tahun 2022 memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Renja PD tahun 2022 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magelang merupakan dokumen perencanaan tahunan yang berpedoman pada dokumen RKPD Tahun 2022 dan Renstra PD Tahun 2019-2024 bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta perkiraan maju yang disusun dalam Renstra PD Tahun 2019-2024, hasil evaluasi Renja PD tahun lalu (2019), dan hasil evaluasi Renja PD tahun berjalan (2020) bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam Renja PD Tahun 2022 dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra PD Tahun 2019-2024.

Tahap penyusunan renja PD Tahun 2022 dilakukan melalui 4 (empat) urutan kegiatan yaitu penyiapan rancangan awal Renja PD, penyiapan rancangan Renja PD, Forum Renja PD, dan penyusunan rancangan akhir Renja PD.

Penyusunan Renja PD Tahun 2022 telah menyesuaikan dengan terbitnya Permendagri No 90 Tahun 2019 merupakan ketentuan

implementatif dari penerapan Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPD). Permendagri No 90 Tahun 2019 sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyediakan dan menyajikan informasi secara berjenjang dan mandiri berupa penggolongan / pengelompokan, pemberian kode, dan daftar penamaan menuju *single codebase* untuk digunakan dalam penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban serta pelaporan kinerja keuangan.

RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2020 dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2020 telah ditetapkan sehingga perlu adanya review terhadap dokumen RPJMD dan Rensra PD.

Masukan dari peserta forum Renja perangkat daerah akan membahani proses penyusunan Renja PD Tahun 2022 melalui proses inventarisasi, klarifikasi, sinkronisasi, dan seleksi usulan program dan kegiatan yang terpadu dalam forum Renja PD.

Renja PD Tahun 2022 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magelang terkait dengan Rencana Kerja dari BNPB dan BPBD Provinsi Jawa Tengah dalam hal program dan kegiatan yang menyangkut dengan pra bencana, tanggap darurat dan pascabencana. Program dan kegiatan yang ada pada Renja BPBD Kabupaten Magelang selaras dengan program dan kegiatan yang ada pada BPBD Provinsi Jawa Tengah dan BNPB.

Renja PD 2022 sebagai dasar penganggaran KUA PPAS dalam RAPBD 2022.

1.2. Landasan Hukum

Renja PD BPBD Kabupaten Magelang Tahun 2022 disusun dengan didasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan bencana Daerah Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah,
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9) ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2009 Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2011 Nomor 3);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang Tahun 2010 – 2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2011 Nomor 5);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 65);
21. Peraturan Bupati Magelang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2011 Nomor 980);
22. Peraturan Bupati Magelang Nomor 34 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 Nomor 34).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari penyusunan Renja PD Tahun 2022 BPBD Kabupaten Magelang adalah sebagai langkah awal untuk menentukan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2022 dan untuk mewujudkan program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah tahun 2022.

Tujuan dari penyusunan Renja PD ini adalah :

1. Memberikan landasan operasional bagi BPBD Kabupaten Magelang dalam menyusun Rencana Kegiatan tahun 2022.
2. Menjadi landasan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022.
3. Menyediakan dokumen rumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif dan lokasi kegiatan dalam bentuk dokumen perencanaan tahunan BPBD tahun 2022
4. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2022.
5. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh BPBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
6. Sebagai petunjuk operasional bagi penyelenggaraan pembangunan tahun 2022.

1.4. Sistematika Penulisan

1. BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

2. BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu dan capaian Renstra PD, Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD, Review terhadap rancangan awal RKPD serta Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

3. BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Memuat tentang telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja PD, program dan kegiatan penunjang prioritas bupati.

4. BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan; uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan; penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kondisi keduanya; dan tabel rencana program dan kegiatan.

5. BAB V PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja (%)	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$91 \leq 100$	Sangat Tinggi
2	$76 \leq 90$	Tinggi
3	$66 \leq 75$	Sedang
4	$51 \leq 65$	Rendah
5	≤ 50	Sangat Rendah

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun 2020 pada BPBD Kabupaten Magelang yang terdiri dari 1 urusan, dengan jumlah 3 program. Hasil evaluasi memperlihatkan bahwa :

1. Terdapat 3 program dengan predikat kinerja sangat tinggi, dengan interval nilai realisasi kinerja sebesar $\geq 91 \%$ yaitu :
 - Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Program Perencanaan Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Program Penanggulangan Bencana
2. Untuk predikat kinerja keuangan terdapat 2 program dengan realisasi kinerja sangat tinggi dengan interval nilai realisasi kinerja sebesar $91 \% \leq 100 \%$ yaitu :

- Program Perencanaan Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (95,55 %)
 - Program Penanggulangan Bencana (93,84)
3. Untuk predikat kinerja keuangan terdapat 1 program dengan predikat tinggi dengan interval nilai realisasi kinerja sebesar $76 \% \leq 90 \%$ yaitu :
- Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah (86,54%)

Secara keseluruhan, hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program pada SKPD BPBD Kabupaten Magelang Tahun 2020 masuk dalam predikat kinerja **Sangat Tinggi** dengan nilai **122,09 %** dari target **100 %**, sedangkan realisasi anggaran Tahun 2020 sebesar **92.24 % (Sangat Tinggi)** lebih rendah dari target **100 %**.

Faktor pendorong tingginya capaian kinerja adalah:

1. Pelaksana kegiatan sesuai dengan jadwal perencanaan,
2. Anggaran yang tersedia cukup memadai,
3. Peran serta masyarakat dan aparatur tim pelaksana kegiatan sangat aktif

Perkiraan capaian tahun 2020 yang terdiri dari 1 urusan dan 3 program dapat terlaksana dengan baik walaupun dalam pelaksanaan kegiatan waktu pelaksanaan tidak sesuai dengan yang telah di rencanakan.

Pencapaian target Renstra PD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya adalah lebih tinggi dikarenakan tercapainya target pelaksanaan kegiatan.

Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah :

1. Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah (95,54%)
2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya (75%)
3. Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya (62,5%)
4. Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah (80%)
5. Manajemen Logistik dan peralatan bencana (87,08%)

Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah :

1. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan (100%)
2. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (100 %)
3. Penyusunan Dokumen Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perangkat Daerah (100%)
4. Pengadaan dan Pengelolaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya (100%)
5. Mitigasi Bencana (100 %)
6. Manajemen Pusdalops PB (100%)
7. Fasilitasi rehabilitasi dan rekontruksi (100 %)
8. Pengadaan tanah, huntara dan huntap (100%)
9. Fasilitas dan Koordinasi Penilaian Post Disasster Need Assestment (PDNA) dan JITU PASNA (100 %)

Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah :

1. Pengelolaan Surat Menyurat, Kearsipan dan Bahan Pustaka (224,29%)
2. Pelatihan dan Pencegahan Mitigasi (600%)
3. Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (105,56 %)
4. Manajemen Penanganan Darurat Bencana (292,55%)
5. Manajemen dan perencanaan penanggulangan bencana (120,69%)
6. komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana (250%)

Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan adalah:

1. Ada beberapa kegiatan yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan jadwal.
2. Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kebutuhan

Faktor-faktor penyebab terpenuhinya target kinerja program/kegiatan adalah :

1. Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal perencanaan
2. Anggaran yang tersedia cukup memadai
3. Peran serta masyarakat dan aparatur dalam pelaksanaan kegiatan sangat aktif.

Faktor-faktor penyebab melebihi target kinerja program/kegiatan adalah :

1. Pelayanan surat menyurat baik surat masuk maupun surat keluar terpenuhi dengan baik.
2. Terbentuknya Destana melampaui dari target yang diharapkan.
3. Tercukupinya kebutuhan akan peralatan bencana diluar perencanaan
4. Jumlah pengerahan TRC yang melampaui perencanaan karena adanya peningkatan penanganan terhadap bencana
5. Bertambahnya pelaksanaan Rakor dalam rangka penanggulangan bencana
6. Terlaksananya sosialisasi rawan bencana yang sedianya akan ditunda dikarenakan adanya refocusing anggaran

Implikasi yang timbul terhadap target target capaian program Renstra PD adalah dengan adanya beberapa program/kegiatan yang tidak dapat berjalan sesuai dengan perencanaan dan tidak memenuhi target kinerja yang sudah ditetapkan berakibat penilaian kinerja BPBD Kabupaen Magelang kurang maksimal, namun tidak berpengaruh dalam semangat dan jiwa kemanusiaan dalam menolong sesama.

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut adalah perlu perencanaan anggaran yang matang dan dalam pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan perencanaan yang ada yaitu berpedoman pada RPJMD, Renstra dan Renja.

Tabel 2.1.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renja PD s/d Tahun 2020 Kabupaten Magelang

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)		
				Target Renja SKPD Tahun (2020)	Realisasi Renja SKPD Tahun (2020)	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7=(6/5)
	URUSAN PADA SEMUA SKPD					
5 2 07	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah				200,91
5 2 07 01	Pengelolaan surat menyurat, kearsipan dan bahan pustaka	Jumlah surat yang dikelola, Jumlah arsip yang dikelola, Jumlah bahan pustaka yang dikelola	3.200 surat, 78 arsip, 100 bahan pustaka,	900 surat, 9 arsip, 36 bahan pustaka,	2.165 surat, 12 arsip, 37 bahan pustaka,	234,29
5 2 07 02	Penyelenggaraan koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang terlaksana, Jumlah layanan hubungan masyarakat dan keprotokolan, Jumlah perjalanan dinas luar daerah yang terlaksana, Jumlah rapat koordinasi yang diselenggarakan	40 kali DD, 12 kali layanan humas, 45 kali DL, 30 kali rakor,	77 kali DD, 18 kali layanan humas, 28 kali DL, 34 kali rakor,	77 kali DD, 12 kali layanan humas, 27 kali DL, 34 kali rakor,	95,54
5 2 07 03	Pengadaan dan pengelolaan perlengkapan dan peralatan gedung	Jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor	2 unit almari besi, 2 filling kabinet, 2 rak arsip, 3 rak	1 unit wireless, 1 unit genset	1 unit wireless, 1 unit genset	100

	kantor/rumah dinas/gedung pemerintah lainnya		logistik, 1 set kursi tamu, 1 unit mesin pemotong rumput, 2 unit komputer PC, 2 unit Notebook, 2 unit printer, 2 unit UPS,	silent	silent	
5 2 07 04	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor/rumah dinas/gedung pemerintah lainnya	Luas gedung kantor yang dipelihara, Jumlah kebutuhan jasa komunikasi, Jumlah jasa kebutuhan SDA, Jumlah kebutuhan jasa listrik	2.046 m², 3 surat kabar, 1 rek telpon, 1 rek fax, 1 rek air, 3 rek listrik	2.046 m², 3 surat kabar, 2 rek telpon, 1 rek fax, 1 rek air, 3 rek listrik, 12 bulan	2.046 m², 3 surat kabar, 2 rek telpon, 1 rek fax, 1 rek air, 3 rek listrik, 9 bulan	75
5 2 07 05	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor/rumah dinas/gedung pemerintah lainnya	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara, jumlah peralatan yang dipelihara, Jumlah perlengkapan yang dipelihara	2 unit truk, 2 unit tangki, 7 unit mobil, 12 unit sepeda motor, 6 unit komputer PC, 4 unit mesin ketik, 4 unit notebook, 4 unit LCD, 20 unit HT, 10 unit RIG, 1 unit RPU, 1 mesin fax, 2 unit camera digital, 4 unit UPS, 1 paket jaringan internet, 1 unit pesawat telpon, 6 unit printer, 1 unit drone, 10 unit AC, 10 unit kursi staf, 3 unit filling kabinet, 2 unit almari kayu, 10 unit meja 1/2 biro, 5 unit meja 1 biro	2 unit truk, 2 unit tangki, 7 unit mobil, 12 unit sepeda motor, 6 unit komputer PC, 4 unit mesin ketik, 4 unit notebook, 4 unit LCD, 20 unit HT, 10 unit RIG, 1 unit RPU, 1 mesin fax, 2 unit camera digital, 4 unit UPS, 1 paket jaringan internet, 1 unit pesawat telpon, 6 unit printer, 1 unit drone, 10 unit AC,	2 unit truk, 2 unit tangki, 7 unit mobil, 12 unit sepeda motor, 8 unit komputer PC, 4 unit notebook, 1 unit RIG, 1 mesin fax, 6 unit UPS, 1 paket jaringan internet, 6 unit printer, 10 unit AC,	62,5
5 2 07 06	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor/rumah dinas/gedung pemerintah lainnya	Jumlah paket rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	5 gedung	-	-	0
5 2 07 07	peningkatan kapasitas dan disiplin aparatur sipil negara	Fekkuensi pembinaan ASN dan jumlah ASN yang dibina,	60 orang/1 kali, 60 stel pakaian PDH/PDL/Olah	-	-	0

		Jumlah seragam dan atribut ASN yang disediakan	Raga			
5 2 08	Program Perencanaan Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian, evaluasi kinerja OPD dan keuangan perangkat daerah				95,12
5 2 08 01	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah kegiatan yang dikelola, Jumlah laporan keuangan yang tersusun	22 kegiatan, 5 laporan (SPJ Fungsional, Realisasi dan prognosis akuntansi, LRA, neraca, CaLK)	20 kegiatan, 6 laporan (SPJ Fungsional, Realisasi dan prognosis akuntansi, LRA, neraca, CaLK)	20 kegiatan, 6 laporan (SPJ Fungsional, Realisasi dan prognosis akuntansi, LRA, neraca, CaLK)	100
5 2 08 02	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen Renstra PD yang tersusun, Jumlah dokumen Renja PD yang tersusun	1 dokumen renstra, 2 dokumen renja	1 dokumen renstra, 1 dokumen renja	1 dokumen renstra, 1 dokumen renja	100
5 2 08 03	Penyusunan laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen pelaporan tahunan yang tersusun, Jumlah dokumen pelaporan tribulanan yang tersusun, Jumlah dokumen pelaporan bulanan yang tersusun,	4 dokumen (LKPj, LKJiP, LPPD dan pelaporan tahunan lainnya yang sejenis), 2 dokumen (Monitoring PK, evaluasi RKPD), 3 dokumen (simoneva, laporan di luar APBD dan laporan bencana)	4 dokumen (LKPj, LKJiP, LPPD dan pelaporan tahunan lainnya yang sejenis), 2 dokumen (Monitoring PK, evaluasi RKPD), 3 dokumen (simoneva, laporan di luar APBD dan laporan bencana),	3 dokumen (LKPj, LKJiP, LPPD dan pelaporan tahunan lainnya yang sejenis), 2 dokumen (Monitoring PK, evaluasi RKPD), 3 dokumen (simoneva, laporan di luar APBD dan laporan bencana)	80
5 2 08 04	Penyusunan dokumen norma, standar, prosedur dan kriteria perangkat daerah	Jumlah dokumen SOP yang tersusun, Jumlah daftar informasi publik yang tersusun,	2 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	100

5	2	23		Program penanggulangan Bencana	Persentase pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana				187,31
5	2	23	01	Mitigasi bencana	Jumlah peserta apel siaga, Jumlah dokumen pemantauan, Jumlah Rakor PRB, Jumlah penyebarluasan informasi, jumlah pemantauan daerah rawan bencana, jumlah gladi sosialisasi, jumlah koordinasi luar daerah, Jumlah LEWS, Jumlah rambu/papan informasi, jumlah kegiatan lomba bagi pelajar dan relawan	500 peserta apel siaga, 1 dokumen pemantauan, 4 kali Rakor PRB, 6 kali sosialisasi, 20 kali pemantauan daerah rawan bencana, 6 kali gladi sosialisasi, 2 kali koordinasi luar daerah, 5 unit LEWS, 25 unit rambu/papan informasi, 2 kali kegiatan lomba bagi pelajar dan relawan	4 unit LEWS	4 unit LEWS	100
5	2	23	02	Pelatihan pencegahan dan mitigasi	Jumlah peserta pelatihan PB, Jumlah pembentukan Destana, Jumlah simulasi PRB untuk warga huntap, Jumlah peserta simulasi darurat pelajar, Jumlah peserta latihan dan gladi evakuasi, Jumlah pembentukan desa bersaudara, jumlah pengembangan desa bersaudara, Jumlah peserta fasilitasi sosek pascabencana, Jumlah lokasi fasilitasi sosek pascabencana	100 orang peserta pelatihan PB, 5 Destana, 50 orang simulasi PRB untuk warga huntap, 200 orang peserta simulasi darurat pelajar, 50 orang pelatihan, 80 orang gladi posko, 200 orang gladi lapang, 1 pasang pembentukan desa bersaudara, 3 pasang pengembangan desa bersaudara, 50 orang peserta fasilitasi sosek pascabencana, 1 lokasi fasilitasi sosek pascabencana	6 destana	36 destana	600

5	2	23	03	Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah peralatan PB, Jumlah APD	1 set repeater portable, 1 set antenna repeater, 1 set kabel repeater, 2 unit gergaji mesin, 1 set peralatan perbengkelan, 1 set vertical rescue, 3 unit motor trail, 60 set APD (sepatu, helm, pakaian, celana, kacamata, sarung tangan, jas hujan)	1 set repeater portable, 1 set antenna repeater, 1 set kabel repeater, 2 unit timbangan digital, 2 unit gergaji mesin, 4 set peralatan perbengkelan, 1 set vertical rescue, 60 set APD (sepatu, helm, pakaian, celana, kacamata, sarung tangan, jas hujan)	1 set repeater portable, 1 set antenna repeater, 1 set kabel repeater, 2 unit timbangan digital, 2 unit gergaji mesin, 1 set pompa air, 3 set selang pompa air, 4 set peralatan perbengkelan, 1 set vertical rescue, 60 set APD (sepatu, helm, pakaian, celana, kacamata, sarung tangan, jas hujan)	105,56
5	2	23	04	Manajemen Pusdalops	Jumlah media sosial, jumlah hari piket, jumlah sistem informasi kebencanaan	5 buah medsos, 365 hari, 1 sistem	5 buah medsos, 365 hari, 1 sistem	5 buah medsos, 365 hari, 1 sistem	100
5	2	23	05	Manajemen penanganan darurat bencana	Jumlah fasilitasi DSP dan DTT, Jumlah pengerahan TRC dan Relawan, Jumlah hari piket TRC	2 kegiatan fasilitasi DSP dan DTT, 1350 orang TRC dan Relawan, 365 hari piket TRC	2 kegiatan fasilitasi DSP dan DTT, 600 orang TRC dan Relawan, 365 hari piket TRC	1 kegiatan fasilitasi DSP dan DTT, 2463 orang TRC dan Relawan, 365 hari piket TRC	292,55
5	2	23	06	Manajemen logistik dan peralatan bencana	Jumlah paket logistic, jumlah pengambilan logistic, jumlah	3 paket logistic, 5 kali logistic, 20 proposal	2 paket logistic, 5 kali logistic, 20	2 paket logistic, 17 kali logistic,	87,08

		proposal peralatan, jumlah dropping air, jumlah distribusi logistic, jumlah rapat koordinasi, jumlah pemeliharaan peralatan kebencanaan	peralatan, 300 tangki dropping air, 100 kali logistic, 2 kali rapat koordinasi, pemeliharaan 7 unit genset, 4 unit pompa air, 8 unit chainsaw, 4 unit lampu sorot, 1 unit tandu, 1 unit water treatment, 4 unit velbed, 1 unit peralatan dapur umum, 6 unit gas apar	proposal peralatan, 500 tangki dropping air, 75 kali logistic, 2 kali rapat koordinasi, pemeliharaan 10 unit genset, 4 unit pompa air, 8 unit chainsaw, 1 unit peralatan dapur umum	20 proposal peralatan, 78 tangki dropping air, 354 kali logistic, 2 kali rapat koordinasi, pemeliharaan 45 unit genset, 19 unit pompa air, 23 unit chainsaw, 4 unit peralatan dapur umum	
5 2 23 08	Fasilitasi rehabilitasi dan rekonstruksi	Jumlah lokasi rehabilitasi daerah rawan bencana	10 lokasi	8 lokasi	8 lokasi	100
5 2 23 09	Pengadaan tanah, huntara dan huntap	jumlah bidang tanah	10 bidang	2 bidang	2 bidang	100
5 2 23 10	Penyusunan dokumen penanggulangan bencana	jumlah dokumen PB (KRB, RPB, PDRP, Renkon, amanat perda)	2 dokumen	-	-	-
5 2 23 11	Manajemen dan perencanaan penanggulangan bencana	jumlah tim pengarah, jumlah rakor, jumlah kegiatan penilaian IKD, jumlah kegiatan monev perbub 18 th 2016, jumlah kegiatan tindak lanjut RAD RPB	20 orang tim pengarah, 5 kali rakor, 1 kali penilaian IKD, 1 kali monev perbub 18 th 2016, 1 kali tindak lanjut RAD RPB	23 orang tim pengarah, 5 kali rakor, 1 kali penilaian IKD	23 orang tim pengarah, 11 kali rakor, 1 kali penilaian IKD	120,69

5	2	23	12	Fasilitasi dan koordinasi peniln Post Dissaster need assesment (PDNA) dan JITU PASNA	jumlah personil, jumlah dokumen	40 orang, 1 dokumen	0 orang, 1 dokumen	0 orang, 1 dokumen	100
5	2	23	14	Komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana	Jumlah rambu/papan informasi	50 unit rambu, 10 kali penyebarluasan informasi, 6 desa, 3 kali rakor, 1 kali studi komparasi	0 desa, 2 kali rakor	2 desa, 3 kali rakor	250

Tabel 2.2.

Rekapitulasi Target Renja PD dan Pencapaian Renja PD Tahun berjalan 2021 Kabupaten Magelang

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2024	Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
					Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tw III Tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
1 5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT		N/a			
1 5 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		N/a			
1 5 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		N/a			
1 5 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renja Perangkat Daerah yang tersusun	N/a	2 dokumen	2 dokumen	100,00%

1	5	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen pelaporan tahunan yang tersusun, Jumlah dokumen pelaporan tribulanan yang tersusun, Jumlah dokumen pelaporan bulanan yang tersusun	N/a	4 dokumen pelaporan tahunan yang tersusun, 4 dokumen pelaporan tribulanan yang tersusun, 12 dokumen pelaporan bulanan yang tersusun	4 dokumen pelaporan tahunan yang tersusun, 3 dokumen pelaporan tribulanan yang tersusun, 9 dokumen pelaporan bulanan yang tersusun	80,00%
1	5	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah koordinasi evaluasi kinerja perangkat daerah	N/a	4 kali	3 kali	75,00%
1	5	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		N/a			
1	5	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	N/a	12 bulan	9 bulan	75,00%
1	5	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah kegiatan yang dikelola, Jumlah laporan pertanggung jawaban yang disusun	N/a	9 kegiatan yang dikelola, 1 laporan pertanggung jawaban yang disusun	9 kegiatan yang dikelola, 1 laporan pertanggung jawaban yang disusun	100,00%
1	5	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan yang tersusun	N/a	1 dokumen	1 dokumen	100,00%
1	5	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		N/a			

1	5	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada SKPD yang tersusun	N/a	5 dokumen	4 dokumen	80,00%
1	5	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		N/a			
1	5	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	N/a	1 paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100,00%
1	5	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	N/a	1 paket Peralatan Rumah Tangga	0 paket Peralatan Rumah Tangga	0,00%
1	5	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan pustaka yang dikelola	N/a	80 dokumen pustaka	38 dokumen pustaka	47,50%
1	5	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi yang diselenggarakan, Jumlah perjalanan dinas luar daerah yang terlaksana, Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang terlaksana Jumlah layanan humas dan protokol yang dilaksanakan	N/a	6 rapat koordinasi, 16 perjalanan dinas luar daerah, 53 perjalanan dinas dalam daerah, 11 kali layanan humas dan protokol	9 rapat koordinasi, 13 perjalanan dinas luar daerah, 18 perjalanan dinas dalam daerah, 9 kali layanan humas dan protokol	56,98%
1	5	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah arsip yang dikelola	N/a	20 dokumen arsip	20 dokumen arsip	100,00%
1	5	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		N/a			
1	5	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang dikelola	N/a	2000 surat	2506 surat	125,30%

1	5	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah kebutuhan jasa komunikasi, Jumlah kebutuhan jasa SDA, Jumlah kebutuhan jasa listrik	N/a	12 bulan jasa komunikasi, 12 bulan jasa SDA, 12 bulan jasa listrik	9 bulan jasa komunikasi, 9 bulan jasa SDA, 9 bulan jasa listrik	75,00%
1	5	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		N/a			
1	5	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	N/a	2 unit truk, 2 unit tangki, 7 unit mobil, 12 unit sepeda motor	2 unit truk, 2 unit tangki, 7 unit mobil, 12 unit sepeda motor	75,00%
1	5	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	N/a	5 jenis	1 jenis	20,00%
1	5	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan yang dipelihara	N/a	15 jenis peralatan	8 jenis peralatan	53,33%
1	5	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luas gedung kantor yang dipelihara, Jumlah gedung yang dipelihara	N/a	2046 meter, 6 gedung	2046 meter, 6 gedung	75,00%
1	5	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA		N/a			
1	5	03	2.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota		N/a			
1	5	03	2.01	02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Rakor PRB, Jumlah sosialisai	N/a	2 kali rakor, 1 kali sosialisasi	2 kali rakor, 1 kali sosialisasi	100,00%
1	5	03	2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		N/a			

1	5	03	2.02	03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah LEWS	N/a	5 unit LEWS	3 unit LEWS	60,00%
1	5	03	2.02	04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah paket peralatan penanggulangan bencana	N/a	2 Paket	0 Paket	0,00%
1	5	03	2.02	07	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah sertifikat tanah, Jumlah lokasi rehabilitasi daerah, Jumlah Tim PDNA dan JITU PASNA	N/a	19 sertifikat tanah, 8 lokasi rehabilitasi daerah, 26 orang Tim PDNA dan JITU PASNA	0 sertifikat tanah, 8 lokasi rehabilitasi daerah, 26 orang Tim PDNA dan JITU PASNA	64,15%
1	5	03	2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		N/a			
1	5	03	2.03	02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah hari piket TRC, Jumlah pengerahan TRC dan Relawan	N/a	365 hari piket TRC, 520 orang pengerahan TRC dan Relawan	270 hari piket TRC, 1250 orang pengerahan TRC dan Relawan	171,75%
1	5	03	2.03	03	Pencarian Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Satgas PB dan Pusdalops, Jumlah hari piket Satgas PB dan Pusdalops	N/a	25 orang Satgas PB dan Pusdalops, 365 hari piket	25 orang Satgas PB dan Pusdalops, 273 hari piket	76,41%
1	5	03	2.03	04	Penyediaan Logistik Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Distribusi Logistik, Jumlah Droping Air, Jumlah Paket Logistik, Jumlah Pengelola Logpal	N/a	100 kali Distribusi Logistik, 300 kali Droping Air, 1 Paket Logistik, 10 orang Pengelola Logpal	215 kali Distribusi Logistik, 159 kali Droping Air, 1 Paket Logistik, 10 orang Pengelola Logpal	93,67%

2.2. Analis Kinerja Pelayanan SKPD

Capaian kinerja BPBD Kabupaten Magelang kurang dari 100% yaitu 80,86% dikarenakan Wilayah Kabupaten Magelang yang sangat luas dan merupakan daerah rawan bencana yang tersebar di 21 kecamatan. Kabupaten Magelang merupakan supermarketnya bencana dikarenakan semua bencana ada di Kabupaten Magelang kecuali bencana Tsunami.

Masih minimnya pengetahuan masyarakat tentang bencana terutama di daerah-daerah rawan bencana, untuk itu diperlukan penjelasan dalam bentuk pelatihan maupun sosialisai kebencanaan. Perlu kesadaran masyarakat Kabupaten yang hidup di daerah rawan bencana untuk dapat hidup berdampingan dengan bencana tanpa menimbulkan atau meminimalkan dampak korban bencana.

Dokumen atau aturan tentang kebencanaan sampai saat ini masih minim karena BPBD Kabupaten Magelang baru memiliki Perda no. 3 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2016 tentang Tahapan Rincian Penanggulangan Bencana di Kabupaten Magelang, Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2018 tentang Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Magelang Tahun 2017-2022 dan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2018 tentang Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022, sedangkan aturan yang lain masih perlu dibuat untuk melengkapinya terutama untuk Dokumen Rencana Kontinjensi tiap jenis bencana.

Dalam pelayanan tanggap darurat BPBD Kabupaten Magelang sudah berusaha semampunya dengan personil yang ada melayani masyarakat yang terdampak bencana berupa bantuan logistik maupun sarana-prasarana pendukung lainnya.

Pelayanan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana dari BPBD Kabupaten Magelang terus berupaya untuk melaksanakan dengan dana APBD Kabupaten, APBD Provinsi, BNPB maupun dana masyarakat terutama CSR dari dunia usaha.

Capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 sebesar 80.86% termasuk dalam kategori **tinggi** sesuai tabel 2.2. Untuk target 2019-2024 sesuai dengan SPM dapat dilihat pada tabel 2.3.

Tabel 2.2.

Pencapaian Kinerja Pelayanan PD BPBD Kabupaten Magelang Tahun 2021

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Cakupan ketangguhan Daerah menghadapi bencana			62.89	65.84	68.6		62.89	80,86	68.6		
		Pelayanan informasi rawan bencana		32.17	36.96	41.01		32.17	100,00%	41.01		SPM
		Persentase Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		31.45	34.41	41.40		31.45	30,00%	41.40		SPM
		Pelayanan penyelamatan dan evakuasi		100	100	100		100	113,95%	100		SPM
		Persentase rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana		85	85	85		87.93	64,15%	85		non SPM

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Tingkat kinerja pelayan PD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan PD adalah sesuai dengan motto BPBD Kabupaten Magelang yaitu *“cepat, tepat menyentuh hati masyarakat”*.

Dalam pelaksanaan penanganan kejadian bencana, BPBD Kabupaten Magelang selalu menjalin kerjasama dengan instansi terkait, 10 sektor penanggulangan bencana, masyarakat dan dunia usaha walaupun belum maksimal. Koordinasi dan kerja sama yang baik sangat diperlukan dalam penanggulangan bencana sesuai tupoksi masing-masing sehingga tidak saling tumpang tindih.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi PD adalah :

1. Masih terbatasnya SDM yang faham dan mengerti tentang penanganan bencana dan jumlah personil yang belum memadai
2. Belum lengkapnya pedoman dan dokumen penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Magelang
3. Belum terfasilitasinya pembentukan desa tangguh bencana di seluruh desa rawan bencana Kabupaten Magelang
4. Belum memadainya kompetensi sumberdaya manusia bidang penanggulangan bencana di Kabupaten Magelang
5. Belum memadainya upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Kabupaten Magelang
6. Belum memadainya peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Magelang
7. Belum sinerginya penyelenggaraan penanggulangan bencana lintas sektor dan lintas wilayah

Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah terhadap capaian program nasional/internasional dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal sub urusan Bencana memuat 3 indikator yaitu Pelayanan informasi rawan bencana, Persentase Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dan Pelayanan penyelamatan dan evakuasi.

Indikator SDGs (Sustainable Development Goals) pada tujuan 1.5, 11.5 dan 13.1 dengan penjelasan 1.5 : Tujuan 1 yaitu Mengakhiri segala bentuk kemiskinan dengan indikator : Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi, Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana, Dokumen strategi pengurangan risiko bencana tingkat daerah. 11.5 : tujuan 11 yaitu Menjadikan kota dan permukiman yang inklusif, aman tangguh dan berkelanjutan dengan indikator : Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang, Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI), Jumlah desa tangguh bencana yang terbentuk, Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan. 13.1 : Tujuan 13 yaitu Mengatasi langkah segera untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya dengan indikator : Dokumen strategi pengurangan risiko, Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.

Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD yang dihadapi BPBD Kabupaten Magelang dalam melaksanakan tugas melayani masyarakat dalam penanganan bencana adalah :

1. Semua pejabat struktural maupun staf mendapatkan pengetahuan dan pelatihan tentang PB dan standar minimal personil BPBD 70 orang
2. Mekanisme pelaporan dan pendataan kebencanaan ke Provinsi dan Pusat menggunakan sistem informasi kebencanaan yang terprogram
3. Dalam penanggulangan bencana harus disediakan dana siap pakai khusus yang berada di BPBD
4. Adanya Peraturan Bupati yang mengatur tentang Rencana penanggulangan Bencana, Kajian risiko Bencana dan Rencana Kontinjensi setiap jenis bencana
5. Seluruh desa di kabupaten magelang menjadi destana
6. Seluruh SDM di BPBD kompeten di bidang PB
7. Tempat pengungsian dan jalur evakuasi tersedia dan memadai
8. Masyarakat dan dunia usaha berperan aktif dalam PB
9. 10 sektor PB dapat bekerjasama pada kegiatan dalam pra, pada saat dan pasca bencana.

Dalam penanggulangan bencana saat ini tidak hanya melibatkan 3 peran yaitu masyarakat, pemerintah dan dunia usaha saja tetapi ditambahkan

dengan peran perguruan tinggi dan media untuk berbagi peran dalam penanggulangan bencana (pentahelix).

Formulasi isu-isu penting untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan adalah :

1. Perlunya peningkatan kapasitas bagi aparat, pemangku kepentingan maupun masyarakat dalam penanggulangan bencana.
2. Pengusulan Dana Siap Pakai BNPB dalam penanganan bencana, untuk Kabupaten Magelang memaksimalkan penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga untuk penanganan bencana.
3. Penanganan bencana menggunakan mekanisme bantuan keuangan khusus untuk desa.
4. Mensukseskan program prioritas Bupati Magelang yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024.
5. Melaksanakan arahan Presiden RI yang disampaikan dalam Rakornas BNPB tahun 2020 yaitu : a) Seluruh instansi pemerintah pusat dan daerah harus bersama-sama, bersinergi untuk upaya pencegahan, mitigasi dan meningkatkan kesiapsiagaan; b) Setiap gubernur, bupati dan walikota harus segera menyusun Rencana Kontinjensi termasuk penyediaan sarana dan prasarana kesiapsiagaan; c) Penanggulangan bencana harus dilaksanakan dengan pendekatan kolaboratif “Pentahelix” yaitu kolaborasi antar unsur pemerintah, akademisi dan peneliti, dunia usaha, masyarakat, serta dukungan media massa; d) Pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus meningkatkan kepemimpinan dan pengembangan sumberdaya manusia yang handal dalam penanggulangan bencana ; e) Panglima TNI dan KAPOLRI untuk turut serta dalam mendukung upaya penanggulangan bencana termasuk penegakan hukum.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan perlu dilakukan karena menyesuaikan dengan perkembangan dan standarisasi indeks harga yang di gunakan. Perkembangan yang dimaksud adalah perubahan target kinerja kegiatan dan besarnya anggaran.

Program dan kegiatan pada BPBD Kabupaten Magelang tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD dalam hal besaran anggarannya berbeda dikarenakan menyesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan dan adanya kegiatan yang tidal dapat dianggarkan karena tidak sesuai degan peraturan yang berlaku.

Jumlah usulan dalam Rencana Awal RKPD tahun 2022 adalah Rp.9,498,605,600,00 sedangkan hasil dari Forum SKPD Tahun 2022 anggaran yang di usulkan sebesar Rp.11.446.185.240,00 lebih besar daripada usulan Rancangan Awal RKPD 2022. Perbedaan disebabkan adanya program dan kegiatan yang sama namun besarannya berbeda.Hal tersebut dapat dilihat pada table 2.4 berikut ini :

Tabel 2.4.
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2022
Kabupaten Magelang

No	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan			
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			4.865.488.600	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			4.972.917.600
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			30.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			30.000.000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renja Perangkat Daerah yang tersusun	2 dokumen	20.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renja Perangkat Daerah yang tersusun	2 dokumen	20.000.000
		Jumlah dokumen SOP yang tersusun	1 dokumen			Jumlah dokumen SOP yang tersusun	1 dokumen	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen pelaporan tahunan yang tersusun	4 dokumen LKPJ, LKJIP, LPPD dan Pelaporan tahunan lainnya yang sejenis	7.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen pelaporan tahunan yang tersusun	4 dokumen LKPJ, LKJIP, LPPD dan Pelaporan tahunan lainnya yang sejenis	7.000.000

		Jumlah dokumen pelaporan tribunalan yang tersusun	2 dokumen monitoringPK, Evaluasi RKPD			Jumlah dokumen pelaporan tribunalan yang tersusun	2 dokumen monitoringPK, Evaluasi RKPD	
		Jumlah dokumen pelaporan bulanan yang tersusun	3 dokumen simoneva, laporan diluar APBD dan laporan bencana			Jumlah dokumen pelaporan bulanan yang tersusun	3 dokumen simoneva, laporan diluar APBD dan laporan bencana	
		Jumlah dokumen profil perangkat daerah yang tersusun	1 dokumen			Jumlah dokumen profil perangkat daerah yang tersusun	1 dokumen	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah koordinasi evaluasi kinerja perangkat daerah	1 kali	3.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah koordinasi evaluasi kinerja perangkat daerah	1 kali	3.000.000
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.995.488.600	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.995.488.600
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	12 bulan	2.935.488.600	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	12 bulan	2.935.488.600
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah kegiatan yang dikelola, Jumlah laporan pertanggungjawaban yang tersusun	9 kegiatan 12 dokumen	60.000.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah kegiatan yang dikelola, Jumlah laporan pertanggungjawaban yang tersusun	9 kegiatan 12 dokumen	60.000.000
		Jumlah laporan Keuangan yang tersusun	1 dokumen			Jumlah laporan Keuangan yang tersusun	1 dokumen	
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			8.614.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			8.614.000
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada SKPD yang tersusun	5 dokumen	8.614.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada SKPD yang tersusun	5 dokumen	8.614.000
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah			242.257.600	Administrasi Umum Perangkat Daerah			242.257.600

	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1 paket Peralatan Rumah Tangga	15.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1 paket Peralatan Rumah Tangga	15.000.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan pustaka yang dikelola	110 dokumen pustaka	7.257.600	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan pustaka yang dikelola	110 dokumen pustaka	7.257.600
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi yang diselenggarakan	40 kali perjalanan	200.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi yang diselenggarakan	40 kali perjalanan	200.000.000
		Jumlah perjalanan dinas luar daerah yang terlaksana	12 kali layanan			Jumlah perjalanan dinas luar daerah yang terlaksana	12 kali layanan	
		Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang terlaksana	40 kali perjalanan			Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang terlaksana	40 kali perjalanan	
		Jumlah layanan humas dan protokol yang dilaksanakan	30 kali lipat			Jumlah layanan humas dan protokol yang dilaksanakan	30 kali lipat	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah arsip yang dikelola	52 dokumen arsip	15.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah arsip yang dikelola	52 dokumen arsip	15.000.000
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			280.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			280.000.000
	Pengadaan Mebel	Jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor	2 filling kabinet, 5 rak arsip, 1 set meja tamu, 1 buah kursi tunggu, 14 kursi pejabat, 50 kursi rapat/ susun, 10 kursi staf	97.215.520	Pengadaan Mebel	Jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor	2 filling kabinet, 5 rak arsip, 1 set meja tamu, 1 buah kursi tunggu, 14 kursi pejabat, 50 kursi rapat/ susun, 10 kursi staf	97.215.520

	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor	5 komputer laptop, 2 unit printer, 4 unit ups, 1 unit audio visual, 3 unit ac, 2 buah Neon Box, 1 paket alat ukur, 1 paket alat komunikasi	182.784.480	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor	5 komputer laptop, 2 unit printer, 4 unit ups, 1 unit audio visual, 3 unit ac, 2 buah Neon Box, 1 paket alat ukur, 1 paket alat komunikasi	182.784.480
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			126.992.400	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			126.992.400
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang dikelola	3000 surat	17.742.400	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang dikelola	3000 surat	17.742.400
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah kebutuhan jasa komunikasi	3 surat kabar, 2 rekening telepon, 1 rekening faximile	109.250.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah kebutuhan jasa komunikasi	3 surat kabar, 2 rekening telepon, 1 rekening faximile	109.250.000
		Jumlah kebutuhan jasa SDA	1 rekening air			Jumlah kebutuhan jasa SDA	1 rekening air	
		Jumlah kebutuhan jasa listrik	3 rekening listrik			Jumlah kebutuhan jasa listrik	3 rekening listrik	
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.182.136.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.289.565.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	2 unit truk, 2 unit tangki, 7 unit mobil, 12 unit sepeda motor, 1 Excavator, 1 Dump Truck, 1Trailer	538.596.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	2 unit truk, 2 unit tangki, 7 unit mobil, 12 unit sepeda motor, 1 Excavator, 1 Dump Truck, 1Trailer	646.025.000
	Pemeliharaan Mebel	Jumlah perlengkapan yang dipelihara	10 unit kursi staf, 3 unit filling kabinet, 2 unit almari kayu, 10 unit meja ½ biro, 5 unit meja 1 biro	7.290.000	Pemeliharaan Mebel	Jumlah perlengkapan yang dipelihara	10 unit kursi staf, 3 unit filling kabinet, 2 unit almari kayu, 10 unit meja ½ biro, 5 unit meja 1 biro	7.290.000

	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan yang dipelihara	6 unit komputer pc, 4 unit mesin ketik, 4 unit notebook, 4 unit LCD, 20 unit HT, 10 unit RIG, 1 unit RPU, 1 mesin fax, 2 unit camera digital, 4 unit UPS, 1 paket jaringan internet, 1 unit pesawat telepon, 6 unit printer, 1 unit drone, 10 unit AC	45.500.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan yang dipelihara	6 unit komputer pc, 4 unit mesin ketik, 4 unit notebook, 4 unit LCD, 20 unit HT, 10 unit RIG, 1 unit RPU, 1 mesin fax, 2 unit camera digital, 4 unit UPS, 1 paket jaringan internet, 1 unit pesawat telepon, 6 unit printer, 1 unit drone, 10 unit AC	45.500.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luas gedung kantor yang dipelihara	2.046 meter	590.750.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luas gedung kantor yang dipelihara	2.046 meter	590.750.000
		Jumlah paket rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	5 gedung			Jumlah paket rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	5 gedung	
B	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA			4.633.117.000	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA			6.473.267.640
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota			76.345.600	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota			76.345.600
	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah sosialisasi***	6 kali	76.345.600	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah sosialisasi***	6 kali	76.345.600
		Jumlah rambu evakuasi**	50 buah			Jumlah rambu evakuasi**	50 buah	
		Jumlah penyebarluasan informasi penanggulangan bencana***	10 kali			Jumlah penyebarluasan informasi penanggulangan bencana***	10 kali	
		Jumlah Rakor kasi kesra dan trantib**	3 kali			Jumlah Rakor kasi kesra dan trantib**	3 kali	

		Jumlah studi komparasi kasi trantib dan kesra	1 kali			Jumlah studi komparasi kasi trantib dan kesra	1 kali	
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			2.852.629.400	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			4.692.780.040
	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RPB yang disusun	2 Dokumen	125.000.000	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RPB yang disusun	2 Dokumen	125.000.000
	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah peserta Pelatihan PB	100 orang	684.444.000	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah peserta Pelatihan PB	100 orang	684.444.000
		Jumlah Pembentukan Destana	5 desa			Jumlah Pembentukan Destana	5 desa	
		Jumlah peserta simulasi PRB untuk warga huntap	50 orang			Jumlah peserta simulasi PRB untuk warga huntap	50 orang	
		Jumlah peserta simulasi darurat pelajar	200 orang			Jumlah peserta simulasi darurat pelajar	200 orang	
		Jumlah peserta latihan dan Gladi evakuasi	50 orang pelantikan, 80 orang gladi posko, 200 orang gladi lapangan			Jumlah peserta latihan dan Gladi evakuasi	50 orang pelantikan, 80 orang gladi posko, 200 orang gladi lapangan	
		Jumlah pembentukan desa bersaudara	2 pasang desa			Jumlah pembentukan desa bersaudara	2 pasang desa	
		Jumlah pengembangan desa bersaudara	33 pasang desa			Jumlah pengembangan desa bersaudara	33 pasang desa	
		Jumlah peserta fasilitasi Sosek Pascabencana	50 orang			Jumlah peserta fasilitasi Sosek Pascabencana	50 orang	
	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah sistem informasi kebencanaan	1 sistem	467.704.400	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah sistem informasi kebencanaan	1 sistem	467.704.400
		Jumlah Medsos	5 medsos			Jumlah Medsos	5 medsos	

		Jumlah LEWS	5 unit			Jumlah LEWS	5 unit	
	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah peralatan PB**	1 set repeater portable, 1 set antena repeater, 1 set kabel repeater, 2 unit gergaji mesin, 1 set pompa air, 1 set selang pompa air, 1 set peralatan perbengkelan, 1 unit timbangan duduk, 1 set vertical rescue	350.000.000	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah peralatan PB**	1 unit Dump Truck, 1 unit backhoe, 1 unit trailer 1 set repeater portable, 1 set antena repeater, 1 set kabel repeater, 2 unit gergaji mesin, 1 set pompa air, 1 set selang pompa air, 1 set peralatan perbengkelan, 1 unit timbangan duduk, 1 set vertical rescue	2.190.150.640
		Jumlah APD**	60 set APD (sepatu, helm, pakaian, celana, kacamata, sarung tangan, jas hujan)			Jumlah APD**	60 set APD (sepatu, helm, pakaian, celana, kacamata, sarung tangan, jas hujan)	
		19. Jumlah peralatan PB**	2 paket			19. Jumlah peralatan PB**	2 paket	
	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Vetiver system utk penanganan longsor	8 lokasi	1.165.481.000	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Vetiver system utk penanganan longsor	8 lokasi	1.165.481.000
		jumlah bidang tanah	10 bidang			jumlah bidang tanah	10 bidang	
		Jumlah peserta pelatihan PDNA dan JITUPASNA	40 orang			Jumlah peserta pelatihan PDNA dan JITUPASNA	40 orang	
		Jumlah Dokumen PDNA dan JITUPASNA	1 dokumen			Jumlah Dokumen PDNA dan JITUPASNA	1 dokumen	
	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Frekuensi Pembinaan ASN dan jumlah ASN yang dibina	60 orang kali	60.000.000	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Frekuensi Pembinaan ASN dan jumlah ASN yang dibina	60 orang kali	60.000.000
		Jumlah seragam dan atribut ASN yang disediakan	60 stel pakaian PDH/ PDL/ Olahraga			Jumlah seragam dan atribut ASN yang disediakan	60 stel pakaian PDH/ PDL/ Olahraga	
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban			1.554.142.000	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			1.554.142.000

	Bencana							
	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas DSP dan DTT**	2 kegiatan	254.142.000	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	1. Jumlah Fasilitas DSP dan DTT**	2 kegiatan	254.142.000
		Jml pengerahan TRC dan Relawan**	1350 orang			2. Jml pengerahan TRC dan Relawan**	1350 orang	
		Jumlah hari piket TRC**	365 hari			3. Jumlah hari piket TRC**	365 hari	
	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelola Penanggulangan Bencana	25 orang	655.000.000	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelola Penanggulangan Bencana	25 orang	655.000.000
		Jumlah hari piket	365 hari			Jumlah hari piket	365 hari	
	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	jumlah paket logistik	3 paket	645.000.000	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	jumlah paket logistik	3 paket	645.000.000
		jumlah pengambilan logistik	5 kali			jumlah pengambilan logistik	5 kali	
		jml proposal	20 proposal			jml proposal	20 proposal	
		Jml dropping air	500 tangki			Jml dropping air	500 tangki	
		jumlah distribusi logistik	100 kali			jumlah distribusi logistik	100 kali	
		jumlah rapat koordinasi	2 kali			jumlah rapat koordinasi	2 kali	
		Jumlah peralatan kebencanaan**	7 unit genset, 4 unit pompa air, 8 unit Chainsaw, 4 unit lampu sorot, 1 Unit Tandu, 1 unit water treatment, 4 unit velbed, 1 Unit peralatan dapur umum, 6 Unit gas apar			Jumlah peralatan kebencanaan**	7 unit genset, 4 unit pompa air, 8 unit Chainsaw, 4 unit lampu sorot, 1 Unit Tandu, 1 unit water treatment, 4 unit velbed, 1 Unit peralatan dapur umum, 6 Unit gas apar	

4	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana			150.000.000	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana			150.000.000	
	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah regulasi yang disusun (Sk, Perbup, Perda)	1 dokumen	10.000.000	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah regulasi yang disusun (Sk, Perbup, Perda)	1 dokumen	10.000.000	
	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	jumlah kegiatan penguatan kelembagaan (penilaian IKD, Tindak Lanjut RAD PRB, Monev Perbup 18/2016)	3 kali	130.000.000	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	jumlah kegiatan penguatan kelembagaan (penilaian IKD, Tindak Lanjut RAD PRB, Monev Perbup 18/2016)	3 kali	130.000.000	
		jumlah tim pengarah Penaggulangan Bencana	22 orang			jumlah tim pengarah Penaggulangan Bencana	22 orang		
		Jumlah Rakor PRB (sinergitas multi sektor penanggulangan bencana)	5 kali			Jumlah Rakor PRB (sinergitas multi sektor penanggulangan bencana)	5 kali		
	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama dan kemitraan antar lembaga (MOu, MOA)	1 dokumen	10.000.000	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama dan kemitraan antar lembaga (MOu, MOA)	1 dokumen	10.000.000	
			JUMLAH	9.498.605.600				JUMLAH	11.446.185.240

2.5. Penelaahan Usulan Program dan kegiatan Masyarakat

Hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari PD kabupaten yang langsung ditujukan kepada PD Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi PD provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten.

BPBD Kabupaten Magelang menerima 2 (dua) usulan dari hasil musrenbang kecamatan yang terkait dengan penanggulangan bencana. Usulan berasal dari Kecamatan Mungkid yaitu dari Desa Ambartawang mengajukan penambahan gedung TEA (dapur, teras,gudang) serta dari Desa Ngrajek mengajukan Pembangunan gedung TEA. Usulan oleh desa terkait tidak dapat diakomodir dalam Renja BPBD Tahun 2022 atau tidak masuk dalam prioritas musrenbang kabupaten.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Secara nasional, seperti halnya pembangunan, upaya penanggulangan bencana harus dilakukan secara komprehensif dan sistematis, namun hal ini masih terkendala dua masalah utama, yaitu:

1. Belum memadainya kinerja aparat dan kelembagaan penanggulangan bencana;
2. Masih rendahnya kesadaran terhadap risiko bencana dan pemahaman terhadap kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.

Tantangan pengembangan pelayanan di tingkat nasional adalah sebagai berikut :

1. Belum sepenuhnya penyelenggaraan penanganan bencana di Indonesia dilaksanakan sesuai dengan UU Nomor 24 Tahun 2007 terutama untuk kewenangan-kewenangan yang sebelumnya sudah ada di Kementerian/Instansi selain BNPB;
2. Terbatasnya anggaran yang tersedia di masing-masing unit Kementerian/Instansi bagi kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia;
3. Adanya perubahan iklim global yang berpotensi meningkatkan intensitas bencana alam di dunia;
4. Adanya keterbatasan sarana komunikasi di daerah sehingga menghambat kecepatan penyebaran arus data ke pusat maupun daerah lain; dan
5. Luasnya cakupan wilayah penanganan penanggulangan kebencanaan dengan jenis potensi bencana yang beragam.

Peluang pengembangan pelayanan di tingkat nasional adalah sebagai berikut :

1. Adanya komitmen dari seluruh komponen bangsa dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
2. Pesatnya perkembangan teknologi untuk menunjang kegiatan di bidang kebencanaan yang dapat dimanfaatkan untuk mengurangi risiko-risiko bencana;

3. Adanya sinkronisasi dan koordinasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana bersama perangkat daerah (propinsi, kabupaten/kota); dan
4. Adanya peran serta masyarakat, LSM baik nasional maupun internasional dalam penanggulangan bencana.

Kementerian Dalam Negeri memiliki sejumlah peluang yang dimanfaatkan secara maksimal akan dapat mendukung kinerjanya dalam meningkatkan kapasitas urusan pemerintahan dalam negeri sejalan dengan tujuan nasional.

Program Bina Administrasi Kewilayahan Dengan sasaran program yaitu meningkatnya konsolidasi dan koordinasi kebijakan penguatan peran gubernur sebagai wakil Pemerintah, peningkatan pelayanan publik dan kerjasama daerah, serta penataan wilayah administrasi dan kawasan (kawasan khusus dan kawasan perkotaan), dan batas antar Negara; serta meningkatnya standarisasi dan kualitas implementasi teknis kebijakan bidang Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat serta pencegahan dan penganggulangan bencana dan bahaya kebakaran. Adapun Indikator Kegiatan Program (IKP) Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, yaitu: Penyediaan layanan dasar bidang penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran sesuai SPM (Standar Pelayanan Minimal).

Program ini dijabarkan ke dalam Kegiatan, yaitu: Fasilitasi Pencegahan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran Dengan sasaran kegiatan yaitu peningkatan kapasitas aparat dan kelembagaan dalam upaya pencegahan penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran

BNPB dengan dukungan para pemangku kepentingan telah mampu membangun sistem nasional penanggulangan bencana yang meliputi aspek legislasi, kelembagaan, perencanaan, pendanaan, peningkatan kapasitas dalam rangka penyelenggaraan PB.

Meski demikian masih terdapat dua masalah pokok yang harus terus ditangani yaitu :

- a. Bagaimana upaya untuk terus meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap risiko bencana dan meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana;
- b. Bagaimana upaya untuk terus meningkatkan kualitas kinerja penanggulangan bencana dengan memanfaatkan secara optimal sumberdaya penanggulangan bencana yang ada.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD

Tujuan Renja PD tahun 2022 adalah Meningkatnya daya saing ekonomi daerah, sedangkan sasaran Renja PD adalah Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam mitigasi bencana dengan indikator Cakupan ketangguhan daerah dalam penanggulangan bencana. Hal tersebut sesuai dengan sasaran target kinerja Renstra BPBD Kabupaten Magelang tahun 2019-2024.

3.3. Program dan Kegiatan Penunjang Prioritas Bupati

Tema pembangunan Kabupaten Magelang tahun 2022 adalah **“Peningkatan kesejahteraan melalui peningkatan kualitas infrastruktur dan pengembangan ekonomi lokal.”** Kejadian luar biasa berupa pandemi *coronavirus disease 2019* (Covid-19) mempengaruhi berbagai sektor di Kabupaten Magelang, sehingga prioritas pembangunan Kabupaten Magelang tahun 2022 yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 perlu diselaraskan dengan kebijakan pemulihan dampak covid-19. Pembiayaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan disesuaikan dengan urutan prioritas sebagai berikut :

1. Mendukung pemulihan akibat dampak Pandemi COVID-19;
2. Mendukung 10 (sepuluh) prioritas pembangunan Kabupaten Magelang (Dasa Cita Bupati dan Wakil Bupati);
3. Mendukung prioritas lainnya.

Program dan kegiatan pembangunan daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magelang mengacu pada RPJMD Kabupaten Magelang tahun 2019-2024 dan Renstra BPBD Kabupaten Magelang tahun 2019-2024 yang dirumuskan secara komprehensif dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan dan dinamika pembangunan selama lima tahun yang akan datang sesuai dengan program pembangunan daerah dengan mengaitkan pada pencapaian visi dan misi kepala daerah. Program dan kegiatan pada BPBD masuk dalam misi kedua yaitu Meningkatkan Daya Saing Daerah yang berbasis pada potensi lokal dengan tetap menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup.

Program unggulan BPBD Kabupaten Magelang dalam rangka peningkatan ketentraman, ketertiban dan penanggulangan bencana difokuskan pada Penguatan sistem penanggulangan bencana (legislasi, kelembagaan, dan

pendanaan). Kegiatan diarahkan pada mitigasi bencana, pelatihan pencegahan dan mitigasi, penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, manajemen pusdalops penanggulangan bencana, fasilitasi rehabilitasi dan rekonstruksi; fasilitasi dan koordinasi penilaian *Post Disaster Need Assestment* (PDNA) dan JITU PASNA, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana. Fokus prioritas ini diampu oleh BPBD melalui program Program Penanggulangan Bencana dengan kegiatan:

- a. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
- b. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, BPBD Kabupaten Magelang telah menyusun Renja tahun 2022 sebagaimana pada tabel 3.1 sebagai berikut :

tabel 3.1

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan PD Tahun 2022 sesuai Renstra
Perangkat Daerah Tahun 2019-2024

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2022	Pagu Indikatif
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			5,487,699,635
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah	100 %	3,687,675,000
1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan	12 dokumen	10,319,000
1	05	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Renja Perangkat Daerah yang tersusun	2 dokumen	6,294,000
1	05	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen pelaporan tahunan yang tersusun(LKPJ, LKJIP dan pelaporan tahunan yang sejenis)	4 dokumen	2,044,000
1	05	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah koordinasi evaluasi kinerja perangkat daerah	4 kali	1,981,000
1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan yang dikelola	11 kegiatan	2,894,702,000
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	12 bulan	2,834,902,000
					Pelaksanaan Penatausahaan	Jumlah Laporan Keuangan yang tersusun	1 dokumen	

1	05	01	2.02	03	dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Laporan pertanggungjawaban yang tersusun	12 dokumen	59,800,000
1	05	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah aset yang dikelola	8 jenis	3,360,000
1	05	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah pada SKPD tersusun	5 dokumen	3,360,000
1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan Administrasi Umum yang Dilaksanakan	7 layanan	64,274,000
1	05	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 paket	2,500,000
1	05	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1 paket	2,238,000
1	05	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan pustaka yang dikelola	110 dokumen pustaka	4,536,000
1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah layanan humas dan protokol yang dilaksanakan Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang terlaksana Jumlah perjalanan dinas luar daerah yang terlaksana Jumlah rapat koordinasi yang diselenggarakan	30 kali 40 kali 12 kali 40 kali	50,000,000
1	05	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah arsip yang dikelola	5 dokumen	5,000,000
1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah paket pengadaan peralatan/ perlengkapan gedung kantor	12 bulan	31,000,000
1	05	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor (Filling kabinet) Jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor (kursi jabatan) Jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor (kursi rapat/susun) Jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor (kursi staf) Jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor (kursi tunggu) Jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor (meja tamu) Jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor (rak arsip) Jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor (rak logistik)	2 unit 14 buah 50 buah 10 buah 1 buah 1 set 5 unit 3 unit	0
						Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor (ac) Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor (alat komunikasi)		

1	05	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor (alat ukur) Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor (audio visual) Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor (komputer laptop) Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor (Neon box) Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor (printer) Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor (ups)	3 unit 1 paket 1 paket 1 unit 5 unit 2 buah 2 unit 4 unit	31,000,000
1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pelayanan jasa penunjang urusan	6 layanan	92,179,000
1	05	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang dikelola	3200 surat	7,179,000
1	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah kebutuhan jasa komunikasi (faximile) Jumlah kebutuhan jasa komunikasi (surat kabar) Jumlah kebutuhan jasa komunikasi (telepon) Jumlah kebutuhan jasa listrik Jumlah kebutuhan jasa SDA	1 rekening 3 jenis 2 rekening 3 rekening 1 rekening	85,000,000
1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	8 jenis	591,841,000
1	05	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara (Dump truk) Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara (Excavator) Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara (mobil) Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara (sepeda motor) Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara (tangki) Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara (trailer) Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara (truk)	1 unit 1 unit 7 unit 12 unit 2 unit 1 unit 2 unit	300,260,000
1	05	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah perlengkapan yang di pelihara (almari kayu) Jumlah perlengkapan yang di pelihara (filling kabinet) Jumlah perlengkapan yang di pelihara (kursi staf) Jumlah perlengkapan yang di pelihara (meja 1/2 biro) Jumlah perlengkapan yang di pelihara (meja 1 biro)	2 unit 3 unit 10 unit 10 unit 5 unit	3,875,000
					Pemeliharaan Peralatan dan	Jumlah peralatan yang dipelihara (camera digital) Jumlah peralatan yang dipelihara (HT) Jumlah peralatan yang dipelihara (komputer pc) Jumlah peralatan yang dipelihara (LCD) Jumlah peralatan yang dipelihara (mesin fax)	2 unit 20 unit 6 unit 4 unit 1 unit	

1	05	01	2.09	06	Mesin Lainnya	Jumlah peralatan yang dipelihara (mesin ketik) Jumlah peralatan yang dipelihara (notebook) Jumlah peralatan yang dipelihara (RIG) Jumlah peralatan yang dipelihara (RPU) Jumlah peralatan yang dipelihara (UPS)	4 unit 4 unit 10 unit 1 unit 4 unit	67,706,000
1	05	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah paket rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor Luas gedung kantor yang dipelihara	5 gedung 2046 meter	220,000,000
1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Capaian Penanggulangan Bencana Persentase pelayanan informasi rawan bencana	100 % 41,01 %	1,800,024,635
1	05	03	2.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Penduduk di Kawasan Rawan Bencana yang memperoleh Informasi Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman Bencana Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana	36.96 % 100 %	66,121,927
1	05	03	2.01	02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	200 orang	66,121,927
1	05	03	2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 %	212,756,708
1	05	03	2.02	01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen PB sampai dinyatakan sah/ legal	1 dokumen	0
1	05	03	2.02	02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	50 orang	0
1	05	03	2.02	03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	30000 orang	55,000,000
1	05	03	2.02	04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Warga Negara yang mendapat peralatan perlindungan	60 orang	32,500,000
1	05	03	2.02	07	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen PDNA dan JITUPASNA Jumlah Sertifikat Tanah Vetiver System untuk penanganan longsor	1 dokumen 9 Sertifikat 2 lokasi	96,924,708
1	05	03	2.02	08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana yang terlaksana	2 kali	28,332,000
1	05	03	2.02	09	Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah penyelesaian dokumen PB sampai dinyatakan sah/ legal	1 Dokumen	0
1	05	03	2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100 %	1,454,146,000
					Respon Cepat Darurat Bencana	Jumlah kecepatan respon		

1	05	03	2.03	02	Kabupaten/Kota	kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	87 kali	254,142,000
1	05	03	2.03	03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah korban berhasil dicari, ditolong, dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	174 orang	713,000,000
1	05	03	2.03	04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana (distribusi logistik) Jumlah pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana (dropping air)	150 kali 150 kali	487,004,000
1	05	03	2.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	100 %	67,000,000
1	05	03	2.04	01	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Regulasi yang Disusun (SK, Perbup, Perda)	1 dokumen	0
1	05	03	2.04	02	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Penguatan Kelembagaan (Penilaian IKD, Tindak Lanjut RAD PRB, Monev Perbup 18/2016) Jumlah Rakor PRB (sinergitas multi sektor penanggulangan bencana)	3 kali 5 kali	0
1	05	03	2.04	03	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Kerjasama dan Kemitraan Antar Lembaga (MOU, MOA)	3 dokumen	0
1	05	03	2.04	04	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	1 aplikasi	67,000,000
TOTAL								5,487,699,635

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja dan pendanaan perangkat daerah mengacu pada Renstra PD 2019-2024 dan RKPD Tahun 2022 yang nantinya disesuaikan dengan hasil analisis rencana pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2022. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian visi dan misi kepala daerah adalah berkurangnya risiko bencana yang berdampak pada masyarakat, dengan strategi peningkatan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana dan penanggulangan bencana penanggulangan bencana Kabupaten Magelang disusun atas dasar regulasi, kelembagaan, dan perencanaan umum untuk setiap fase bencana.

Total kebutuhan dana/ pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya untuk tahun 2022 sesuai dengan Renstra PD 2019-2024 adalah sebesar Rp. 5,487,699,635,- dengan 2 program dan 11 kegiatan, sebagaimana Rumusan Rencana Program dan Kegiatan PD Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023 Kabupaten Magelang dalam tabel 4.1 sebagai berikut :

Tabel. 4.1.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan PD Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023 Kabupaten Magelang

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Rencana Tahun 2022				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
								Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Tolok Ukur		Target
				YANG BERKAITAN DENGAN									
				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PELAYANAN DASAR									
05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						5,487,699,635			9,483,911,600
05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						3,687,675,000			4,972,917,600
05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						10,319,000			30,000,000
05	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah	Dokumen Renja Perangkat Daerah yang tersusun	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 dokumen	6,294,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah	100 %	20,000,000
05	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah	Jumlah dokumen pelaporan tahunan yang tersusun(LKPJ, LKJIP dan pelaporan tahunan yang sejenis)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 dokumen	2,044,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah	100 %	7,000,000
05	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah	Jumlah koordinasi evaluasi kinerja perangkat daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 kali	1,981,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah	100 %	3,000,000
05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2,894,702,000			2,995,488,600
05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah	Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 bulan	2,834,902,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah	100 %	2,935,488,600
05	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah	Jumlah Laporan Keuangan yang tersusun Laporan pertanggungjawaban yang tersusun	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 dokumen 12 dokumen	59,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah	100 %	60,000,000

05	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					3,360,000				8,614,000
05	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah	Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah pada SKPD tersusun	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 dokumen	3,360,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah	100 %	8,614,000
05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					64,274,000				242,556,040
05	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 paket	2,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah	100 %	5,000,000
05	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 paket	2,238,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah	100 %	15,298,440
05	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah	Jumlah bahan pustaka yang dikelola	Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	110 dokumen pustaka	4,536,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah	100 %	7,257,600
05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah	Jumlah layanan humas dan protokol yang dilaksanakan Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang terlaksana Jumlah perjalanan dinas luar daerah yang terlaksana Jumlah rapat koordinasi yang diselenggarakan	Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 kali 40 kali 12 kali 40 kali	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah	100 %	200,000,000
05	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah	Jumlah arsip yang dikelola	Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 dokumen	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah	100 %	15,000,000
05	01	2.07		Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					31,000,000				279,701,560
						Jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor (Filling kabinet) Jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor (kursi jabatan) Jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor (kursi rapat/susun) Jumlah paket pengadaan		2 unit 14 buah					

05	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah	perlengkapan gedung kantor (kursi staf) Jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor (kursi tunggu) Jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor (meja tamu) Jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor (rak arsip) Jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor (rak logistik)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 buah 1 buah 1 set 5 unit 3 unit		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah	100 %	118,439,665
05	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah	Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor (ac) Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor (alat komunikasi) Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor (alat ukur) Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor (audio visual) Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor (komputer laptop) Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor (Neon box) Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor (printer) Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor (ups)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 unit 1 paket 1 paket 1 unit 5 unit 2 buah 2 unit 4 unit	31,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah	100 %	161,261,895
05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						92,179,000				126,992,400
05	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah	Jumlah surat yang dikelola	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3200 surat	7,179,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah	100 %	17,742,400
05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah	Jumlah kebutuhan jasa komunikasi (faximile) Jumlah kebutuhan jasa komunikasi (surat kabar) Jumlah kebutuhan jasa komunikasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 rekening 3 jenis 2 rekening	85,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah	100 %	109,250,000

						(telepon)							
						Jumlah kebutuhan jasa listrik		1 rekening					
						Jumlah kebutuhan jasa SDA							
05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			591,841,000					1,289,565,000
05	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara (Dump truk) Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara (Excavator) Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara (mobil) Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara (sepeda motor) Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara (tangki) Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara (trailer) Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara (truk)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 unit 1 unit 7 unit 12 unit 2 unit 1 unit 2 unit	300,260,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah	100 %	646,025,000
05	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah	Jumlah perlengkapan yang di pelihara (almari kayu) Jumlah perlengkapan yang di pelihara (filling kabinet) Jumlah perlengkapan yang di pelihara (kursi staf) Jumlah perlengkapan yang di pelihara (meja 1/2 biro) Jumlah perlengkapan yang di pelihara (meja 1 biro)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 unit 3 unit 10 unit 10 unit 5 unit	3,875,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah	100 %	7,290,000
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Persentase ketercapaian	Jumlah peralatan yang dipelihara (camera digital) Jumlah peralatan yang dipelihara (HT) Jumlah peralatan yang dipelihara (komputer pc) Jumlah peralatan yang dipelihara (LCD) Jumlah peralatan yang dipelihara (mesin fax)	Semua Kab/Kota,	2 unit 20 unit 6 unit 4 unit 1 unit		Dana Transfer	Persentase ketercapaian		

05	01	2.09	06	Lainnya	perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah	Jumlah peralatan yang dipelihara (mesin ketik) Jumlah peralatan yang dipelihara (notebook) Jumlah peralatan yang dipelihara (RIG) Jumlah peralatan yang dipelihara (RPU) Jumlah peralatan yang dipelihara (UPS)	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 unit 4 unit 10 unit 1 unit 4 unit	67,706,000	Umum-Dana Alokasi Umum	perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah	100 %	45,500,000
05	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah	Jumlah paket rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor Luas gedung kantor yang dipelihara	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 gedung 2046 meter	220,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah	100 %	590,750,000
05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					1,800,024,635				4,510,994,000
05	03	2.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota					66,121,927				76,345,600
05	03	2.01	02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Persentase Capaian Penanggulangan Bencana Persentase pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	200 orang	66,121,927		Persentase Capaian Penanggulangan Bencana Persentase pelayanan informasi rawan bencana	100 % 41,01 %	76,345,600
05	03	2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana					212,756,708				2,305,784,400
05	03	2.02	01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Penanggulangan Bencana	Jumlah penyelesaian dokumen PB sampai dinyatakan sah/ legal	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 dokumen	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Capaian Penanggulangan Bencana	100 %	125,000,000
05	03	2.02	02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Penanggulangan Bencana	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 orang	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Capaian Penanggulangan Bencana	100 %	299,444,000
05	03	2.02	03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Penanggulangan Bencana	Jumlah Warga Negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30000 orang	55,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Capaian Penanggulangan Bencana	100 %	467,704,400
05	03	2.02	04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Persentase Capaian Penanggulangan Bencana	Jumlah Warga Negara yang mendapat peralatan perlindungan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60 orang	32,500,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase Capaian Penanggulangan Bencana	100 %	138,155,000

05	03	2.02	07	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen PDNA dan JIUPASNA Jumlah Sertifikat Tanah Vetiver System untuk penanganan longsor	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 dokumen 9 Sertifikat 2 lokasi	96,924,708	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Capaian Penanggulangan Bencana	100 %	1,165,481,000
05	03	2.02	08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Penanggulangan Bencana	Jumlah Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana yang terlaksana	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 kali	28,332,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Capaian Penanggulangan Bencana	100 %	60,000,000
05	03	2.02	09	Penyusunan Rencana Kontijensi	Persentase Capaian Penanggulangan Bencana	Jumlah penyelesaian dokumen PB sampai dinyatakan sah/ legal		1 Dokumen	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Capaian Penanggulangan Bencana	100 %	50,000,000
05	03	2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana					1,454,146,000				1,662,142,000
05	03	2.03	02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Penanggulangan Bencana	Jumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	87 kali	254,142,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Capaian Penanggulangan Bencana	100 %	254,142,000
05	03	2.03	03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Penanggulangan Bencana	Jumlah korban berhasil dicari, ditolong, dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	174 orang	713,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Capaian Penanggulangan Bencana	100 %	713,000,000
05	03	2.03	04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Penanggulangan Bencana	Jumlah pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana (distribusi logistik) Jumlah pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana (dropping air)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	150 kali 150 kali	487,004,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Capaian Penanggulangan Bencana	100 %	695,000,000
05	03	2.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana					67,000,000				466,722,000
05	03	2.04	01	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Penanggulangan Bencana	Jumlah Regulasi yang Disusun (SK, Perbup, Perda)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 dokumen	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Capaian Penanggulangan Bencana	100 %	4,722,000
05	03	2.04	02	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Penanggulangan Bencana	Jumlah Kegiatan Penguatan Kelembagaan (Penilaian IKD, Tindak Lanjut RAD PRB, Monev Perbup 18/2016) Jumlah Rakor PRB (sinergitas multi sektor penanggulangan bencana)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 kali 5 kali	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Capaian Penanggulangan Bencana	100 %	385,000,000

05	03	2.04	03	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Penanggulangan Bencana	Jumlah Kerjasama dan Kemitraan Antar Lembaga (MOU, MOA)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 dokumen	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Capaian Penanggulangan Bencana	100 %	10,000,000
05	03	2.04	04	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Persentase Capaian Penanggulangan Bencana	Jumlah Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan		1 aplikasi	67,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Capaian Penanggulangan Bencana	100 %	67,000,000
5,487,699,635												9,483,911,600	

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 merupakan tahapan perencanaan program lima tahunan dan merupakan dokumen perencanaan tahunan yang memuat berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan. Kegiatan dimaksud disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi PD Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

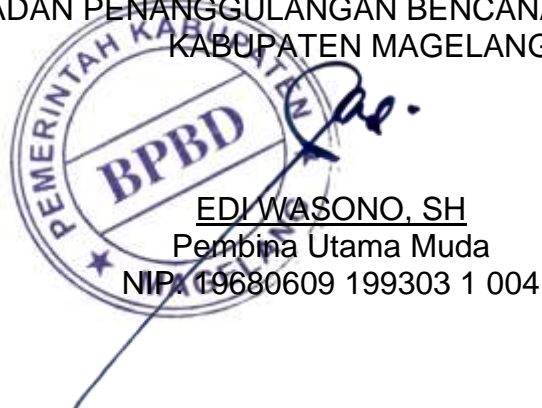
Penyusunan Renja PD 2022 menyesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan anggaran. Pada saat pelaksanaannya mengacu KUA PPA dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang telah ditetapkan.

Penyusunan Rencana Kerja PD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 merupakan upaya guna meningkatkan kinerja PD agar lebih efektif, efisien dan optimal dalam mencapai sasarannya pada tahun 2022.

Rencana tindak lanjut setelah penetapan Renja PD Tahun 2022 adalah mengusulkan KUA PPAS Tahun 2022 dan menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran sebagai panduan PD melaksanakan kegiatan.

Kota Mungkid, Desember 2021

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN MAGELANG



EDI WASONO, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19680609 199303 1 004